



**ANALISIS KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARAWANG
DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN ANAK
JALANAN DI KABUPATEN KARAWANG**

TESIS

With a Summary in English

NIDA HANDAYANI

NPM : 2009941007

KEKHUSUSAN : OTONOMI DAERAH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2013**



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**ANALISIS KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARAWANG
DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN ANAK
JALANAN DI KABUPATEN KARAWANG**

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

**MAGISTER SAINS
ILMU ADMINISTRASI**

NIDA HANDAYANI
NPM : 2009941007
KEKHUSUSAN : OTONOMI DAERAH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2013**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Nida Handayani
NPM : 2009941007
Program Studi : Ilmu Administrasi
Kekhususan : Otonomi Daerah
Judul Tesis : Analisis Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam Melaksanakan Program Pemberdayaan Anak Jalanan di Kabupaten Karawang

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Maret 2013
Waktu : 16.00-17.30 WIB

**Dan dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua Sidang : Dr. Rahmat Salam, M.Si

Pembimbing : Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M. Si

Penguji Ahli : Dr. Ramli Toha, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini, tujuan karya ilmiah inui adalah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Maister Sains (M. Si) Program Studi Ilmu Administrasi konsentrasi Otonomi Daerah Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Penelitian ini membahas tentang “Analisis Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang Dalam Melaksanakan Program Pemberdayaan Anak Jalanan di Kabupaten Karawang”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan program memberdayakan anak jalanan.

Penulis menyadari kekuatan yang diperoleh adalah sebuah dorongan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan sebuah inspirasi, untuk itu pula dalam kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dengan tulus ikhlas yang mendalam kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, dosen pembimbing yang telah membantu membimbing dan mengarahkan dengan bijaksana serta meluangkan waktu sampai tesis ini selesai.
2. Prof. Dr. Ir. Suhendar Sulaeman MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta
3. Prof. Dr. Hj Masyitoh, M. Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
4. Jajaran Dosen yang telah membimbing secara intensif
5. Staf karyawan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan pelayanan dan bantuan selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua dan segenap keluarga besar H. Ade Dadi Suhandi yang telah memberikan doa dan semangat yang panjang selama proses pembuatan tesis.

7. Suami (Bambang Irawan S. Pd. I) dan anaku tercinta (Almer Jamail Irawan) yang selalu memberikan support sehingga tidak putus semangat dan lelah dalam mencari ilmu.
 8. Rekan-rekan kuliah angkatan 19 Program Studi Ilmu Administrasi Konsentrasi Otonomi Daerah Sekolah Pascasarjana UMJ
 9. Dinas Sosial Kabupaten Karawang yang telah memberikan kemudahan dalam proses penelitian sehingga data-data yang dibutuhkan dapat diperoleh.
- Akhirnya saya mengharapkan Tesis ini dapat memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah dan pengembangan khazanah ilmu pengetahuan.

Jakarta, Februari 2013

Nida Handayani

ABSTRAK

- A. Nama : Nida Handayani
- B. Judul Tesis : Analisis Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam Melaksanakan Program Pemberdayaan Anak Jalanan di Kabupaten Karawang
- C. Jumlah Halaman : 201 halaman (12 halaman depan, 144 halaman isi, 4 halaman daftar pustaka, 41 halaman lampiran).
- D. Isi Ringkasan :

Fenomena anak jalanan adalah suatu kondisi permasalahan sosial yang erat hubungannya dengan masalah ekonomi, dimana perlu suatu penanganan khusus demi terciptanya generasi bangsa yang sehat dan berkualitas. Permasalahan anak jalanan adalah tanggungjawab semua pihak dimana seluruh masyarakat perlu peduli terhadap permasalahan sosial ini, namun tentu pemerintah memiliki peran tersendiri dan penting dalam penanganan masalah anak jalanan, karena wewenang yang ada dapat mempengaruhi kondisi dan situasi publik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam penanganan dan pemberdayaan anak jalanan di Kabupaten Karawang melalui program-program yang telah dikerjakannya. Seberapa banyak dan seberapa jauh program-program yang telah dikerjakan Dinas Sosial mempengaruhi kondisi anak jalanan yang ada di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan teori kinerja. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif analisis dengan tehnik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, data dokumen dan studi kepustakaan.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pada tahun 2009 anak jalanan di Kabupaten Karawang berjumlah 257 orang, dan jumlah ini terus bertambah dari tahun ke tahunnya namun secara angka belum bisa disebutkan karena belum dilakukannya lagi pendataan terkini terhadap jumlah anak jalanan di Kabupaten Karawang. Hal ini juga terkait kinerja Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan.

Sebagai analisis bahwa kinerja Dinas Sosial dalam pemberdayaan anak jalanan dilakukan melalui program-program dalam berbagai bidang, diantaranya bidang pendidikan dengan mengikutsertakan anak jalanan pada program sekolah kejar paket A/B/C yang setara dengan SD/SMP/SMA, serta pemberian beasiswa pendidikan. Pada Bidang kesehatan, dilakukannya layanan medis pencegahan HIV/AIDS, pemberian makanan sebagai tambahan gizi, dan pelayanan jamkesmas. Bidang sosial ekonomi dilakukan dengan pemberian pelatihan keterampilan sebagai bentuk usaha kemandirian. Selain

program-program yang dilakukan, Dinas Sosial juga melakukan referal/rujukan beberapa anak jalanan kepada Kemensos RI untuk dilakukan pembinaan dan bimbingan melalui *social development centre for children* (Bambu Apus, Jakarta). Dalam pelaksanaan program kerjanya Dinas Sosial bekerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah (pekerja sosial) sebagai salah satu usaha pencapaian tujuan.

Program-program pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial di Kabupaten Karawang adalah suatu bentuk usaha penanganan permasalahan anak jalanan sehingga meminimalisir ataupun menghilangkan keberadaan anak jalanan di jalanan yang bukan sepatasnya, sehingga perlunya strategi, kerja keras dan keseriusan agar tujuan yang ingin dicapai dapat dilaksanakan secara optimal. Dengan demikian harapan Kabupaten Karawang sebagai kota layak anak dapat terwujud.

E. Daftar Pustaka : 50 buku, 1 dokumen, 7 kebijakan, dan 2 website.

The street children is a condition of social problems close conjunction with economic issues, where we need a special handling in order to create high quality generation and healthy people. The problem is all the more responsibilities the public should care where all of this social problems, but of course the government has an important role in handling the street children, because it could affect the activity and public situation.

The aim of this research is to find out the task and direction of regional government especially Dinas Sosial Kabupaten Karawang in the care and empowerment of street children in Karawang through programs that have been to do. How much and how far the program has done for the Social affecting the existing conditions of street children in the Karawang. This study uses the theory of performance. The research method was qualitative, with type of research is analysis deskriptif and technique of collecting data through direct observation, interviews, document data and literature study.

Based on the data obtained in 2009 that street children in Karawang amounted to 257 people, and this number is growing from year to year, but the number can not be specified as yet another execution of the current data collection on the number of street children in Karawang. It is also linked to the performance of Dinas Sosial in the handling of street children.

As the analysis of the performance of the Dinas Sosial in the empowerment of street children through programs in various fields, including the field of education by involving street children in sekolah kejur paker A/B/C which is equivalent in elementary school/junior high school/senior high school, as well as educational scholarships. In the health sector, execution of medical services to prevent HIV/AIDS, supplementary feeding as nutrition

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Masalah

Diberbagai negara berkembang termasuk Indonesia, aktivitas pembangunan terkait kepentingan dan kebutuhan masyarakat umum lebih dominan dilaksanakan oleh organisasi pemerintah (organisasi publik). Untuk menjalankan fungsi pelayanan secara baik dan menyentuh kebutuhan pelanggannya (masyarakat), maka diperlukan dukungan dari berbagai unsur. Unsur yang dimaksud adalah unsur perilaku organisasi yang baik, meliputi perilaku manusia baik individu maupun secara tim kerja, pengaturan dan mekanisme kerja seperti sistem, prosedur dan metode kerja dalam organisasi publik serta sarana pelayanan dan kualitas personilnya. Unsur-unsur seperti dikemukakan di atas pada semua jenjang dalam organisasi publik/pemerintahan belum sepenuhnya dimiliki sehingga menjadi penyebab masalah, diantaranya sebagai berikut :

1. kurang baiknya perilaku manusia / aparat
2. lemahnya pengaturan dan mekanisme kerja
3. kurang memadainya sarana pelayanan
4. kurangnya perhatian pimpinan terhadap bawahan
5. kualitas aparat yang belum memadai seiring dengan perkembangan teknologi

Untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih berimbang pada tingkat pusat maupun daerah, pemerintah memberikan wewenang dan

kekuasaan penuh kepada pimpinan daerah dalam mengurus urusan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri yang selanjutnya disebut dengan "Hak Otonomi Daerah". Seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu dasar yang komprehensif dan terpadu dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya. Dasar tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya yang diwujudkan dalam birokrasi pemerintahan

Abdullah (1984) mengatakan bahwa determinan penting untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah adalah dibutuhkan "Infra-Struktur Admnistrasi" yang memiliki kesiapan dan ketangguhan pada semua tingkatan dan tahapan yang meliputi : (a) organisasi pelaksana yang berintikan birokrasi yang mantap dan tangguh; (b) sistem administrasi atau tata laksana yang efektif dan efisien; dan (c) susunan aparatur atau personalia yang berkemampuan tinggi dari segi profesional, orientasional yang disertai rasas dedikasi yang tinggi. Hal ini berarti bahwa kinerja birokrasi pemerintah dalam

merencanakan, mengimplementasikan dan evaluasi serta pengendalian proses pembangunan dan pelayanan masyarakat sangat ditentukan oleh faktor kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, aparatur dan dukungan sarana dan prasarana yang tersedia.

Salah satu elemen untuk meningkatkan produktifitas kerja adalah Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini telah kita ketahui bersama bahwa perilaku manusia di dalam organisasi akan dipengaruhi para pekerja secara umum, namun pada prinsipnya dari dalam diri para pekerja yang bersangkutan dengan lingkungan organisasi dimana ia berada dalam situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Sehingga tuntutan akan kinerja yang lebih efektifitas dan efisiensi yang akan memberikan produktifitas tinggi sangat dibutuhkan, karena dapat meningkatkan setiap unit kerja pada masa yang akan datang.

Penilaian kinerja birokrat pemerintah didasarkan pada faktor-faktor input seperti jumlah pegawai, anggaran, peraturan perundangan dan termasuk pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan. Sementara Siagian (1987), mengidentifikasi ada tiga jenis kelemahan yang melekat pada pegawai negeri (birokrat) kita, adalah (1) kemampuan manajerial, yaitu kurangnya kemampuan memimpin, menggerakkan bawahan, melakukan koordinasi dan mengambil keputusan, (2) kemampuan teknis, yaitu kurangnya kemampuan untuk secara terampil melakukan tugas-tugas, baik yang bersifat rutin, maupun yang bersifat pembangunan, dan (3) kemampuan teknologis, yaitu

kurangnya kemampuan untuk memanfaatkan hasil-hasil penemuan teknologi dalam pelaksanaan tugas.

Dinas Sosial merupakan suatu instansi Pemerintah Daerah, yang menangani langsung kegiatan bidang sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bidang social garapan Dinas Sosial adalah isu anak jalanan.

Dalam lingkungan bermasyarakat akan banyak sekali ditemukannya masalah sosial. Masalah sosial tidak hanya melibatkan diri sendiri sebagai pelaku, melainkan juga akan memberikan banyak pengaruh bagi lingkungan dan masyarakat banyak. Salah satu masalah lingkungan yang akan saya gali lebih dalam adalah masalah lingkungan mengenai anak jalanan. Di Indonesia komunitas anak jalanan begitu banyak, tersebar tidak hanya di kota-kota besar saja, di daerah-daerah juga banyak sekali anak-anak jalanan.

Perkembangan yang begitu pesat ternyata tidak hanya dirasakan oleh para orang dewasa yang harus kerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya, kondisi serupa juga harus dirasakan oleh anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin yang terpaksa harus bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Salah satu cara yang dihadapi oleh anak dalam membantu ekonomi keluarga adalah ketika mereka *terpaksa* atau *dipaksa* oleh keluarga ataupun keadaan untuk kejalanan guna mendapatkan kebutuhan ekonomi tersebut.

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak memiliki masa depan yang jelas, dimana keberadaan mereka seringkali menjadi "masalah" bagi banyak pihak keluarga, masyarakat dan negara. Namun perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar, padahal mereka adalah saudara kita, mereka juga adalah amanah Allah yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh-kembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah. Berdasarkan UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pada Bab II Pasal 2 yang menjelaskan hak anak diantaranya: 1) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar; 2) anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna; 3) anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; dan 4) anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam konteks ini anak jalanan jelas dipandang sebagai suatu permasalahan sosial kemasyarakatan yang memerlukan suatu metode penyelesaian yang tepat sesuai dengan harapan semua *stakeholders*. Mulandar

(1996: 112) memberikan empat ciri yang melekat ketika seorang anak digolongkan sebagai anak jalanan :

1. Berada ditempat umum (jalan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3-24 jam sehari.
2. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, sedikit sekali yang tamat SD).
3. Berasal dari keluarga-keluarga tidak mampu (kebanyakan kaum urban, beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya).
4. Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal).

Selain ciri khas yang melekat akan keberadaannya, anak jalanan juga dapat dibedakan dalam tiga kelompok. Surbakti dalam Suyanto (2002: 41) membagi pengelompokan anak jalanan tersebut sebagai berikut : *Pertama, Children On The Street*; yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalanan, namun mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Fungsi anak jalanan dalam kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh orang tuanya. *Kedua, Children Of The Street*; yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial dan ekonomi, beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tua mereka tetapi frekuensinya tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab, biasanya kekerasan, lari, atau pergi dari rumah. *Ketiga, Children From Families Of The Street* ; yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan, walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari suatu tempat ketempat yang lain dengan segala resikonya.

Dampak krisis moneter dan ekonomi dalam kaitannya dengan anak jalanan (Huraerah, 2006:78), adalah:

1. Orang tua mendorong anak untuk membantu ekonomi keluarga.
2. Pola pendidikan dan pengasuhan yang salah terhadap anak oleh orang tua sehingga menyebabkan anak lari kejalan.
3. Anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah.
4. Makin banyaknya anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrak rumah meningkat.
5. Timbulnya persaingan dengan pekerja dewasa di jalanan, sehingga terpuruk melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi terhadap keselamatannya dan eksploitasi anak oleh orang dewasa di jalanan.
6. Anak lebih lama berada di jalanan sehingga mengundang masalah lain.
7. Anak jalanan lebih lama menjadi korban pemerasan dan eksploitasi seksual, terutama terhadap anak jalanan yang perempuan.

Dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Artinya Pemerintah mempunyai tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convension on the Right of the Chil* (konvensi tentang hak-hak anak). Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya dan perlindungan khusus.

Konvensi hak-hak anak merupakan komitmen dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak agar dapat tumbuh secara wajar. Kemudian, pemerintah juga menerbitkan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Pasal 55 tentang

perlindungan anak yang meliputi: (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pada realitasnya menunjukkan bahwa hak-hak seperti yang tercantum dalam konvensi hak anak dan UU yang mengaturnya belum sepenuhnya didapatkan oleh anak jalanan tersebut. Orang tua memang merupakan pihak utama untuk memberikan hak-hak tersebut, tetapi karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak mendukung, maka peran Pemerintahlah khususnya melalui Dinas Sosial berkewajiban memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak.

Berdasarkan gambaran dia atas, kinerja Dinas Sosial Kabupaten karawang dalam pelaksanaan programnya yang terkait isu anak jalanan dan program pemberdayaanya menjadi ketertarikan penulis untuk menelitinya dan mengetahui lebih jauh sampai dimana pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan di kabupaten karawang yang dilakukan oleh Dinas Sosial sebagai dinas daerah yang merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah.

Penanganan anak jalanan sampai saat ini terus-menerus dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang maupun pihak lain yang fokus terhadap anak jalanan, ternyata belum menunjukkan hasil yang signifikan. Proses pemberdayaan telah dilakukan, namun hasil belum maksimal, dengan kata lain ada input tetapi belum ada outcome. Ini disebabkan oleh beberapa hal yang akan dijelaskan selanjutnya.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor/4-9-2009) penanganan anak jalanan (<http://1.bp.blogspot.com>), menurut Banuara Nadeak selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang bahwa “jumlah penduduk Kabupaten Karawang tahun 2009 mencapai 2 juta lebih. Meningkatnya jumlah tersebut, maka meningkatkan resiko pertumbuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), termasuk juga jumlah anak jalanan.

Danilaga selaku Kepala Seksi bidang Anak Jalanan Dinas Sosial Kabupaten Karawang menambahkan “ada beberapa isu penting terkait anak jalanan, isu tersebut diantaranya:

- a. bertambahnya anak jalanan secara kualitas dan kuantitas
- b. rendahnya tingkat pendidikan
- c. belum optimalnya peran stake holder dan swasta
- d. kurangnya koordinasi antar instansi terkait
- e. tingginya mobilitas penduduk
- f. belum optimalnya penegak hukum terhadap eksploitasi anak jalanan

Adanya tujuan program pemerintah untuk menyelamatkan, melindungi, dan menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh

kembang, dan perlindungan sosialnya. Sasarannya adalah para anak jalanan, anak terlantar, serta anak yang rawan menjadi anak jalanan.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang jumlah anak jalanan pada tahun 2009 berjumlah 257 orang. Menurut Kasie bidang anak jalanan Dinsos Karawang Jumlah ini terus bertambah dari tahun ke tahunnya, namun secara angka belum bisa dipastikan jumlahnya. Hal ini dikarenakan Dinas sosial yang seharusnya melakukan pemutihan data 3 bulan sekali, namun kenyataannya sampai tahun 2012 ini belum ada pendataan kembali.

Sementara itu data yang diperoleh dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat berdasarkan data anak jalanan hasil pemetaan tahun 2011 di 14 Kabupaten/Kota dapat di lihat pada tabel berikut :

No	Nama Kota/Kab.	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kab. Bogor	158	50	208
2.	Kab. Bandung	186	35	222
3.	Kab. Cirebon	175	62	239
4.	Kab. Majalengka	85	6	91
5.	Kab. Sumedang	64	26	90
6.	Kab. Karawang	183	53	236
7.	Kab. Bekasi	147	75	222
8.	Kota Bogor	682	81	765
9.	Kota Bandung	678	443	1121
10.	Kota Cirebon	95	48	143
11.	Kota Bekasi	132	52	185
12.	Kota Depok	417	316	733
13.	Kota Cimahi	58	7	65
14.	Kota Tasikmalaya	146	42	188
Total		3206	1296	4508

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Kab. Karawang termasuk dengan jumlah anak jalanan terbanyak pada tingkat Kabupaten di wilayah

Jawa Barat setelah Kab. Cirebon yang hanya terpaut tiga angka, dibanding dengan Kab. Bogor dan Kab. Bandung yang lebih sedikit jumlahnya padahal pada Kotanya masing-masing memiliki jumlah anak jalanan terbanyak. Dilihat pada tingkat pembangunan daerahnya, jika dibandingkan dengan Kab. Bekasi yang lebih pesat, namun jumlah anak jalanan di Kab. Karawang lebih banyak. Dengan demikian peneliti merasa perlu menganalisis sebuah pola atau sistem yang menangani mengenai masalah anak jalanan yang ada di Kab. Karawang.

Biasanya pekerjaan yang dilakukan anak-anak jalanan di kabupaten karawang sebagian besar adalah mengemis, mengamen, berjualan (makanan, kantong plastic, dll), dan mengumpulkan beras yang berceceran di pasar.

Peningkatan jumlah anak jalanan di Kabupaten Karawang merupakan permasalahan bagi pemerintah daerah dan masyarakat baik yang secara langsung ataupun tidak langsung bersentuhan dengan anak jalanan. Faktor utama meningkatnya keberadaan anak jalanan di Kabupaten Karawang ini lebih disebabkan oleh keadaan ekonomi keluarga yang kurang sehingga keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan si anak, baik itu untuk kebutuhan hidup maupun kebutuhan biaya untuk sekolah, yang pada akhirnya dengan terpaksa si anak disuruh untuk bekerja ataupun atas inisiatif anak sendiri, karena melihat beban keluarganya yang sangat berat.

Dalam proses pemberdayaan anak jalanan, Dinas Sosial kabupaten Karawang telah melaksanakan program kegiatan berupa penyediaan rumah singgah yang dibina langsung oleh Dinsos Karawang berupa pelatihan setiap triwulan sekali dengan sasaran anak jalanan diatas 15 tahun sampai 18 tahun

dan keluarga anak jalanan atau keluarga anak jalanan yang memiliki anak jalanan di bawah usia 15 tahun. Dalam pelaksanaannya Dinsos dibantu oleh pihak luar (organisasi masyarakat, LSM bidang sosial), hal ini disebabkan kurangnya personil yang ada di Dinsos Karawang untuk pelaksanaan program pemberdayaan anak jalanan ini.

Bentuk pembinaanya sendiri berupa peternakan ikan lele, dan penetasan telur ayam. Namun untuk penetasan telur ayam sendiri belum bisa berjalan dengan baik dikarenakan sulitnya proses penetasan dan keahlian atau tenaga ahli yang kurang memadai. Dalam pelaksanaan pelatihan atau pemberdayaan tersebut, peserta berasal dari anak jalanan usia diatas 15 tahun dan keluarga anak jalanan.

Kendala atau hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Karawang dalam pelaksanaan pelatihan ini adalah pasca pelatihan tidak ada tindakan lanjutan terhadap pemberdayaan tersebut. Kasie bidang anak jalanan (Drs Danilaga) menjelaskan “bukan tidak ada program lanjutan dari pelaksanaan pelatihan tersebut, tetapi belum turunnya dana yang diajukan kepada DPPKAD (Dinas pendapatan Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Karawang, kelambatan turunnya dana tersebut disebabkan payung hukum yang berubah-ubah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 13 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan banuan social keagamaan, budaya dan olah raga bagi kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi pemerintah, dan organisasi keagamaan. Serta Peraturan Bupati Karawang

Nomor 14 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat pemerintah Kabupaten Karawang bidang perekonomian.

Dari data dan penjelasan di atas, bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang belum optimal dan maksimal dalam penanganan dan pemberdayaan anak jalanan. Dari mulai pendataan anak jalanan, sampai kepada proses kelanjutan pemberdayaan anak jalanan dan keluarga anak jalanan.

Melalui optimalisasi kinerja dari Dinsos Karawang dan dibantu oleh organisasi masyarakat yang peduli anak jalanan serta adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dimana dengan program yang realistis akan tercipta kebijakan utama untuk mengentaskan masalah anak jalanan. Disamping itu, kelanjutan dari program pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah implementasi yang nyata, dan yang paling diharapkan oleh anak jalanan misalnya, dengan terciptanya lapangan pekerjaan, bila memang pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan usia anak dan tidak terlalu membahayakan keselamatan jiwanya serta masih mendapatkan kesempatan untuk sekolah dan bermain maka tidak akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Anak akan terdidik melalui pekerjaan itu untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab.

Terlepas dari pembinaan yang diberikan kepada anak jalanan, hal terpenting yang juga harus diperhatikan oleh Dinas Sosial adalah pembinaan terhadap keluarga anak jalanan tersebut. Jika karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung menjadi faktor anak turun ke jalanan untuk bekerja

membantu orang tuanya, maka pembinaan terhadap keluarga yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial adalah dengan pemberdayaan ekonomi keluarga yang menciptakan kemandirian, sehingga akhirnya dengan berbagai program pembinaan yang diberikan, baik kepada si anak maupun kepada keluarganya diharapkan mereka tidak kembali lagi ke jalanan. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji dan menganalisa bagaimana implementasi kebijakan program kinerja Dinas Sosial dalam pembinaan terhadap anak jalanan apakah telah terealisasi dengan baik atau tidak dengan melihat factor yang mempengaruhinya.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam melaksanakan program kegiatan Pemberdayaan Anak Jalanan di Kabupaten Karawang?
2. Apa saja faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan program pemberdayaan anak jalanan di Kabupaten karawang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam melaksanakan program pemberdayaan anak jalanan di Kabupaten Karawang.

2. Untuk menemukan factor yang berpengaruh dalam melaksanakan program pemberdayaan anak jalanan di Kabupaten Karawang.

D. Signifikasi Penelitian

1. Secara akademis

- a. Diharapkan bermanfaat untuk perkembangan dalam bidang ilmu Administrasi khususnya otonomi daerah yang berkaitan dengan masalah social.
- b. Memperkaya khasanah pustaka yang berkaitan dengan manajemen pembangunan aparat pemerintah khususnya pemerintah daerah Dinas Sosial Kabupaten Karawang.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberi masukan sebagai bahan evaluasi program bagi aparatur pemerintah daerah Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam penanggulangan dan pemberdayaan anak jalanan.
- b. Memberikan masukan sekaligus sebagai bahan kajian lapangan dan evaluasi program baik bagi Pemerintah Daerah maupun Dinas Sosial Kabupaten Karawang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bagian, yang terdiri dari bab pendahuluan, bab landasan teori, bab metodologi penelitian, bab pembahasan masalah penelitian, dan bab penutup sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, memaparkan tentang latar masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Berisi tentang penjelasan konsep, aspek-aspek konsep dan kerangka pemikiran yang berisi teori-teori tentang kinerja, manajemen kinerja, pemberdayaan, definisi anak jalanan dan definisi pekerja sosial. Serta alur pikir dari konsep.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab metodologi penelitian akan disampaikan tempat dan waktu penelitian, metodologi penelitian, teknik pemilihan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis dan keabsahan data, dan keterbatasan penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dianalisis kinerja Dinas Sosial dalam melaksanakan program pemberdayaan anak jalanan di kabupaten Karawang serta menjelaskan factor yang berpengaruh dari program pemberdayaan tersebut.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kesimpulan terdiri dari kesimpulan dan saran penelitian sebagai gambaran dari garis besar apa yang dijelaskan dalam penelitian dan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial.